

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni dan Irviani (2017, 13). (2019). Bab Ii Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://kbbi.web.id/preferensi.html>Diakses
- Annam, B. C., Khoer, R. M., & Ikram, S. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), 320. <https://doi.org/10.29210/020232643>
- Achmad Husaini Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jejak* 6, no. 2 (2015): 1–9
- Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ/1995 tentang Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak.
- H. Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.2.
- Ika Yuliyanti, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).
- Manurung, S. M., & Banjarnahor, H. (2020). *PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BATAM Mahasiswa Program Studi Akuntansi , Universitas Putera Batam Dosen Program Studi Akuntansi , Universitas Putera Batam* *ABSTRACT Tax is the biggest source of income in Indonesia in financing development . Effors.*
- Nadhiastutie, A. (2010). Efektivitas penagihan pajak aktif terhadap optimalisasi penerimaann pajak. *E-Journal*.
- Ni Luh Supadmi, “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 4, no. 2 (2009): 1–14.
- Primerdo, R. Y. (2015). *PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)*. 1–18. <http://eprints.ums.ac.id/36888/>
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir denagan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9.

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 8.
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Silaban, J. M. P. (2010). *Landasan Teori Faktor-Faktor Yang*. 2007, 9–23.
- Su, A. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Sulastyawati, “Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat.”
- Setiadi Alim Lim, “UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA,” *Jurnal Bisnis* 9 (2017): 28–47.
- Soemitro, Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco.1991
- Tarigan, P. B. (2017). Bab Ii Tinjauan Pustaka Pajak Penghasilan 25. *Jurnal Perpajakan*, 53(9), 1689–1699.
- W. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 8(02), 155. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>